BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Sejarah Perpajakan Indonesia

Sejarah perpajakan di Indonesia dibagi menjadi dua masa :

1. Masa sebelum Kemerdekaan
2. Masa sesudah Indonesia merdeka sejak 17 agustus 1945

1. Sejarah Pajak Bumi dan Bagunan

Sejak awal 19 pada zaman kolonial pajak tanah diberlakukan pada saat pulau jawa diperitah oleh Inggris yan dipimpin Letnan Jenderal Raffles. Pajak tanah waktu itu dinamakan Landrent , yang artinya “sewa tanah”. Raffles meniru sistem pajak tanah di India dengan 3 jenis macam sistem pemungutan landrent yaitu :

1. Sistem zamindari atau zamindarars artinya landheer atau tuan tanah. Sistem ini mengenakan pajak tanah dengan suatu jumlah yan tetap pada kepada para tuan tanah. Pengenaan tarif pajak dengan suatu jumlah yang tetap disebut dengan istilah “Permanent Settlement”. Sistem ini dipakai di Benggala dan disekitar barat laut India.
2. Sistem Pateedari atau Mauzawari. Sistem ini meniru sistem pajak bumi pemerintah Portugis di Goa. Sistem ini memberlakukan pajak bumi pada Desa yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Selanjutnya pengenaan

kepada penduduk kebijaksanaannya diserahkan kepada Kepala Desa masing-masing. Sistem ini diberlakukan di Ppenge unyab dan distrik-distrik barat Laut India.

3. Sistem rayatwari. Dalam sistem ini, pajak tanah/bumi dikenakan langsung kepada para petani yang mengolah tanah berdasarkan pendapatan rata-rata dari tanah yang diusahakan oleh masing-masing petani. Sistem ini diberlakukan di Madras, Bombay dan sebagainya.

Pajak tanah diberlakukan di Pulau Jawa oleh Raffles pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Landrent didasarkan pada suatu dalil bahwa " semua tanah adalah milik Raja (souvereign), dan semua Kepala Desa dianggap sebagai "penyewa" (pachetrs). Oleh karenanya mereka harus membayar "sewa tanah" (Landrent) dengan natura secara tetap. Ketika kekuasaan beralih pada Belanda Landrent diubah menjadi "landrente", sistem ini merubah sistem terdahulu dengan melakukan perubahan mengarah kepada keadilan dan kepentingan rakyat, yang berlangsung sampai dengan tahun 1942. Di masa penjajahan Jepang tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, sistem pajak tanah yang dilaksanakan Belanda diambil alih sepenuhnya dan namanya diganti menjadi Pajak Tanah.

Setelah Indonesia merdeka, pajak tanah diubah menjadi pajak bumi. Periode tahun 1945 sampai tahun 1951 untuk melaksanakan pajak bumi masih emnggunakan cara lama yaitu :

1. Pajak Bumi di wilayah Negara Republik Indonesia deangan pusat pemerintahan di Yogyakarta dihapus, untuk wilayah federal pajak bumi terus berlaku;
2. Pajak Bumi di wilayah Negara Republik Indonesia dihapus dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1951. hal ini disebabkan adanya desakan dari golongan yang dipimpin oleh Tauchid.
3. Desakan politik tersebut dikenal sebagai Mosi Tauchid, dan sebagai gantinya dikeluarkan pajak baru yaitu Pajak Penghasilan atas Tanah Pertanian (PPTP).

Tahun 1951 sampai tahun 1959, setelah dikeluarkannya UU. NO. 14 tahun 1951 tentang Penghapusan Pajak Bumi di wilayah Negara Republik Indonesia, maka lahirlah Jawatan pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI) yang bertugas melakukan pendaftaran atas tanah-tanah milik adat yang ada di Indonesia. Karena tugasnya hanya mengurus pendaftaran tanah saja, maka namanya diubah kembali menjadi jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia (PTMI) dan bertugas sama seperti sebelumnya ditambah dengan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Pendaftaran sementara terhadap tanah milik yang sudah terdaftar.

Tahun 1959 sampai tahun 1985 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 11 tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (LN Th. 1959 Nomor 104. TLN. NO. 1806) yang dengan Undang-Undang Nomor tahun 1 Tahun 1961 (LN Th. 1961 No.3 TLN No. 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang . Selanjutnya nama jawatan yang mengelola Pajak hasil Bumi

menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi dalam melaksanakannya dikeluarkan Suart Keputusan Menteri Iuran Negara Nomor PMPPU 1-1-3 tanggal 29 Nopember 1965 yang menetapkan Direktorat pajak hasil Bumi diubah namanya menjadi Direktorat Iuran Pembangunan daerah(DIT-IPEDA). Pajak Hasil Bumi (PHB) menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA). Pengenaannya diberlakukan pada yanah-tanah sektor pedesaan, perkotaan, perhutanan. Sektor perkebunan dan sektor pertambangan. Tahun 1985 sampai dengan tahun 1995 sesuai dengan amanat GBHN 1983 berdasarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 telah diadakan "fax Reform" yaitu diadakan pembaruan dan penggantian peraturan perundang-undangan perpajakan yang selama ini berlaku. Tax reform tahun 1983 berlaku pada tanggal 1 januari 1984. Dengan adanya tax reform, sistem perpajakan Indonesia berubah dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*. *Official Assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan pada Surat Ketetapan Pajak (SKP). *Self Assessment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang dipercayakan kepada Wajib Pajak mulai menghitung sampai penyetoran. Aparat perpajakan melaksanakan pengendalian tugas, pembinaan,penelitian, pengawasan, dan penetapan sanksi administrasi. Setelah *Tax Reform* 1983 lalu dikeluarkan Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (PBB), yang ditetapkan tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku tanggal 1 januari 1986 (LN Th. 1985 No. 68, TLN 3312). Tanggal 9 November 1994 disahkan Undang-undang No. 12 tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.

12 tahun 1985 tentang PBB, tang mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Januari 1995 (LN Th. 1994 No. 62, TLN 3569).

2. Sejarah Pajak Penghasilan

Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 periode yaitu :

1. Masa sebelum tahun 1920

   Sebelum tahun 1920 diberlakuakn sistem pajak yang berbeda untuk pribumi, untuk orang Asing Asia dan untuk orang Eropah (*indigenous* Indonesians, *foreign Asians* and *Europeans*).

2. Masa 1920 sampai dengan 1983

   Tahun 1920 sampai dengan 1983 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   1. Ordonansi PPd 1920 (*The Income Tax Ordinance of 1920*). Sekarang diberlakukan pajak yang sama tanpa melihat asal usul keturunan (the unification principle) masa itu pula diperkenalkan Pajak Kekayaan.
   2. *Corporation tax Ordinance of* 1925 (ordonansi pajak perseroan PPS 1925 dan berlaku sampai dengan 1983). Subyeknya adalah badan hukum seperti, PT,CV atas saham, obyeknya adalah laba bersih.
   3. *Personal Income Tax Ordinance of* 1932(Ordonansi pajak Pendapatan 1932 = *ordonantie op Inkomstenbelasting* 1932). Pajak pendapatan pertama kali dipungut di Indonesia berdasarkan ordonansi pajak pendapatan 1908 (*ordonantie op de inkomstenbelasting* 1908). Tahun

1920 ordonansi ini diganti dengan ordonansi pajak pendapatan 1920, lalu tahun 1932 menjadi ordonansi pajak pendapatan 1932 dan terakhir diganti menjadi ordonansi pajak pendapatan 1944.Ordonansi pajak pendapatan 1944 semula bernama "pajak perang" (*Oorlogsbelasting*) atau pajak peralihan 1944 (*Overgangsbe lasting* 1944). Ordonansi pajak pendapatan 1944 bentuk aslinya disiapkan di Australia oleh pemerintah Hindia Belanda dalam pelarian, sewaktu Indonesia diduduki Jepang.Rancangan ordonansi tersebut disusun tahun 1943 diumumkan dalam staatsblad 1944 No 17 dan diberlakukan 1 januari 1945 saat yang bersamaan maka "*ordonantie op de inkomstenbelasting* 1932" dinyatakan tidak berlaku lagi.Ordonansi pajak pendapatan 1944 yang semula dinamakan *Oorlogsbelasting* (pajak perang). Mulai 1 januari 1946 namanya diubah menjadi "*Overgangsbelasting*" (pajak peralihan), lalu dengan Undang-undang No. 21 tahun 1957 (LN No. 41 tahun 1957) nama ordonansi tersebut dengan resmi menjadi "ordonansi pajak pendapatan 1944". Oleh Pemerintah Hindia Belanda Ordonansi dibuat dengan sederhana dan darurat karena mengingat keadaan saat itu. Dan kelak akan diganti dengan suatu ordonansi pajak atas pendapatan yang lebih sempurna.Subyek Pajak Pendapatan 1932 adalah : orang pribadi, badan/persekutuan (Fa-Firma, CV, Kongsi). Obyeknya adalah Pendapatan bersih.Dengan berbagai kekurangan maka ketentuan-ketentua yang terdapat dalam ordonantie op Inkomstenbelasting 1932. Menyadari kekurangan yang terdapat dalam

ordonansi ini pemerintah Indonesia berusaha menyempurnakannya dengan menyesuaikan dengan keadaan, yang dilakukan mulai tahun 1960 terakhir dengan undang-undang No. 9 Tahun 1970, ordonansi pajak pendapatan 1944 aslinya tersusun dalam bahasa Belanda. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia pertama kali dimuat dalam buku "Perundang-undangan Pajak Indonesia, terbitan Juni 1960 yang diterjemahkan oleh Prof Dr.Rochmat Soemitro,SH dan Drs B. Usman. (4) *Wages Tax Ordonance* of 1935 (ordonansi pajak upah 1935) dimana pemungutan pajaknya dilakukan oleh para majikan, saat itu diperkenalkan di Indonesia PYE = Pay-As-You-Eam(bayar sesuai dengan upah yang diterima).

4. Masa 1984 sampai sekarang.

   Tahun 1984 sampai saat ini mulai berlakunya tax reform yang ditetapkan tahun 1983. 1 januari 1984 mulai berlaku Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang PPh yang disahkan tanggal 31 Desember 1983 (LN 1983 No :TLN 3263). Kemudian PP No 42 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang PPh 1984 yang ditetapkan pada tanggal 13 November 1985 mulai diberlakukan untuk tahun pajak 1985. Tahun 1991 sudah ada Undang-undang No. 7 tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983tentang PPh. (LN 1991 No. 93. TLN 3459). Tahun 1994 dikeluarkan Undang-undang No.10 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telahdiubah dengan Undang-

undang No.7 tahun 1991 (LN 1994 No. 60. TLN 3567). Terakhir diubahlagi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001.

3. Sejarah Pajak Perseroan

Pajak perseroan (PPs) berkaitan dengan pajak pendapatan atau pajak penghasilan. Pajak atas pendapatan dan laba pertama kali dilakukan di Indonesia tahun 1878 dengan nama "*Patentrecht*" suatu pungutan pajak yang sederhana. Pungutan pajak atas pendapatan dan laba berdasarkan pada ketentuan yang lebih teratur dan terinci baru pada tahun 1908 sejak ordonansi pajak pendapatan 1908 (ordonantie op de Inkornstenbelasting 1908). Seperti halnya "*Patentrecht*", ordonantie pajak pendapatan 1908 hanya berlaku terhadap golongan penduduk orang-orang Eropa dan orang-orang yang disamakan dengan orang Eropa, demikian pula terhadap badan-badan usaha yang dimilikinya. Untuk orang-orang pribumi dan lainnya terkena jenis pajak yang lebih sederhana seperti "*Landrente*". Ketika pecah perang Dunia ke I (1914-1918), menyebabkan Hindia belanda terlepas dari negeri Belanda. Untuk menggalang persatuan maka diberlakukan asas unifikasi yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa semua golongan penduduk mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Pelaksanaan asas unifikasi dibidang perpajakan berdampak pada digantinya Ordonansi Pajak pendapatan 1908 (yang hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu), dengan ordonansi pajak pendapatan 1920 (yang berlaku untuk semua golongan penduduk), yang memajaki baik orang maupun badan. Peningkatnya jumlah penanaman modal

asing di Indonesia sejak tahun 1920 menimbulkan berbagai problema dalam bidang Yuridis fiskal yang mendorong segera dikeluarkan ketentuan tersendiri guna dapat memungut pajak dari badan usaha. Tahun 1925, semua ketentuan yang menyangkut pengenaan pajak badan usaha yang terdapat dalam ordonansi pajak pendapatan 1920 dikeluarkan untuk kemudian disusun kembali dalam suatu ordonansi baru yang diberi nama Ordonansi pajak perseroan 1925 (*Ordonantie op deVennootschapsblasting* 1925). Ordonansi Pajak Perseroan 1925 setelah diadakan perubahan danpenambahan menjadi Undang-undang No. 8 tahun 1970

4.2. Analisis Deskriptif Variabel yang Diteliti

4.2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 2000-2009

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan, Khususnya bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan gamabaran tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi secara rinci dari tahun ketahun, disajikan, melalui *Product Domestic Bruto (PDB)* atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha secara berkala. Jika terjadi pertumbuhan positif, hal ini menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dibandingkan dengan tahun lalu. Sebaliknya apabila menunjukkan negatif, hal ini menunjukkan terjadinya penurunan perekonomian dibandingkan dengan tahun lalu.

Tabel 4.10

Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002 – 2009

(Triliun Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian, perternakan, kehutanan dan perikanan (% terhadap PDB)	231.89 (16.7)	246.28 (17.1)	281.33 (17.5)	296.2 (16.6)	329,12 (14,3)	364,17 (13,1)	563,22 (13)	622,93 (13,7)	716,06 (14,5)	858,25 (15,3)
2	Pertambangan dan penggalian (% terhadap PDB)	189.49 (13.6)	191.07 (13.2)	191.83 (11.9)	191.2 (10,7)	205,25 (8,9)	309,01 (11,1)	478,52 (11)	510,61 (11,2)	540,61 (10,9)	591,53 (10,5)
3	Industri Pengolahan (% terhadap PDB)	355.86 (25.6)	361.33 (25)	402.60 (25)	440.5 (24.7)	644,34 (28,1)	760,36 (27,4)	1.192,53 (27,5)	1.228,65 (27)	1.380,71 (27,9)	1.480,91 (26,4)
4	Lisitrik, Gas dan Air Minum (% terhadap PDB)	30.38 (2.2)	20.18 (1.4)	29.10 (1.8)	39,70 (2.2)	23,73 (1)	26,69 (1)	37,35 (0,9)	38,72 (0,9)	40,85 (0,8)	46,82 (0,8)
5	Kontruksi (% terhadap PDB)	90.44 (6.5)	84.56 (5.8)	92.37 (5.7)	107.1 (6)	151,25 (6,6)	195,11 (7)	325,13 (7,5)	349,99 (7,7)	419,64 (8,5)	554,98 (9,9)
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran (% terhadap PDB)	212.98 (15.3)	233.56 (16.2)	258.87 (16.1)	291.6 (16.3)	368,56 (16,1)	431,62 (15,6)	651,54 (15)	680,86 (14,9)	691,49 (14)	750,61 (13,4)
7	Pengankutan dan Komunikasi (% terhadap PDB)	76.17 (5.5)	75.09 (5.2)	97.34 (6)	111.7 (6.3)	142,29 (6,2)	180,58 (6,5)	301,52 (6,9)	310,26 (6,7)	312,19 (6,3)	352,41 (6,3)
8	Keuangan, Real Estate, dan Jasa Perusahaan (% terhadap PDB)	94.33 (6.8)	90.73 (6.3)	105.62 (6.6)	123.0 (6.9)	194,41 (8,5)	230,52 (8,3)	353,13 (8,1)	348,21 (7,7)	368,13 (7,4)	404,12 (7,2)
9	Jasa-jasa (% terhadap PDB)	135.74 (9.8)	140.66 (9.7)	150.96 (9.4)	185.7 (10.4)	236,87 (10.3)	276,20 (10)	436,26 (10,1)	460,66 (10,1)	481,67 (9,7)	573,82 (10,2)
Produk Domestik Bruto		**1572.1**	**1623.35**	**1610.01**	**1786.7**	**2.295,83**	**2.774,28**	**4.339,22**	**4.550,89**	**4.951,36**	**5.613,44**
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas		**1389.77**	**1443.02**	**1421.68**	**1.594.9**	**2083.08**	**2458.23**	**3967.04**	**4.234.41**	**4.427.19**	**5146.51**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009

Pembahasan dari Pertumbuhan PDB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2000

   Perekonomian indonesia pada tahun 2000, PDB atas dasar harga yang berlaku sebesar Rp. 1572,1 triliun. Sektor Pertanian memberi kontribusi sebesar 16,7 persen, sektor pertambangan dan penggalian memberi kontribusi 13,6 persen, sektor industri pengolahan merupakan pemberi kontribusi terbesar yaitu 25,6 persen, sektor listrik, gas, dan air minum memberi kontribusi sebesar 2,2 persen, sektor kontruksi member kontribusi sebesar 6,5 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberi kontribusi sebesar 15,3 persen, pengangkutan dan komunikasi memberi kontribusi sebesar 5,5 persen, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan memberi kontribusi sebesar 6,8 persen, dan jasa-jasa member kontribusi sebesar 9,8 persen.

2. Tahun 2001

   Perekonomian indonesia pada tahun 2001 mengalimi pertumbuhan dibanding dengan tahun 2000. Nilai PDB atas dasar harga yang berlaku, PDB tahun 2001 naik sebesar Dibandingkan dengan peranan tahun 2000, pada penurunan PDB tahun 2001 terjadi dihampir seluruh sektor ekonomi. Penurunan yang cukup besar terjadi pada sektor Kontruksi dari 6,5 % pada Tahun 2000 menjadi 5,8 % pada Tahun 2001. Sebaliknya, sektor Pedagangan, Hotel dan Restoran nain dari 15,3 % pada Tahun 2000 menjadi 16, 2 % pada Tahun 2001.

3. Tahun 2002

   Perekonomian Indonesia bila dilihat dengan harga yang berlaku pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 1610,01 triliun, dibanding tahun 2001 sebesar Rp. 1623,25 triliun. Data PDB atas dasar harga belaku menunjukan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan peranan antar sektor ekonomi menunjukan bahwa hampir separuh (42, 5%) PDB Indonesia bersala dari sektor pertanian dan industri pengolahan pada kondisi harga berlaku tahun 2002. Sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing memberikan kontribusi 17, 5 % dan 25 %. Dibanding dengan peranan tahun 2001, pada tahun 2002 terjadi sedikit perubahan peranan pada beberapa sektor ekonomi yaitu penurunan pada sektor pertambangan, sektor bangunan, sektor perdagangan hotel, restoran dan sektor jasa-jasa. Penurunan yang cukup besar terjadi pada sektor pertambangan dari 13, 2 % pada tahun 2001 menjadi 11,9 % di tahun 2002. Sektor bangunan peranannya menurun dari 5,88 % pada tahun 2001 menjadi 5,74 % pada tahun 2002. Sektor perdagangan, hotel dan restoran peranannya menurun dari 16, 2 % pada tahun 2001 menjadi 16,1 % pada tahun 2002. Sedangkan jasa-jasa dari 9,7 % pada tahun 2001 menjadi 9,4% pada tahun 2002

4. Tahun 2003

   Perekonomian pada tahun 2003 mengalami pertumbuhan sebesar 4,1% dibanding tahun 2002. Nilai PDB atas dasar Harga berlaku pada tahun 2003 naik sebesar Rp 176,1 triliun dari 1610,01 triliun pada tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 1786,7 triliun pada tahum 2003. Dibandingkan dengan peran

tahun 2002, pada tahun 2003 peranan beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan pada sektor pertanian, sektor pertambangan, dan ektor industri pengolahan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada sektor industri pengelohan dari 25 persen pada tahun 2002 menjadi 24.7 persen ditahun 2003. Sektor pertanian peranannya menurun dari 17,5 persen menjadi 16,6 persen pada tahun 2003. Sektor pertambangan perannya menurun dari 11,9 menjadi 10,7 persen. PDB secara total dan PDB tanpa migas terlihat peranan non migas semakin meningkat yaitu dari 89,03 persen padxa tahun 2002 menjadi 89,27 persen pada tahun 2003.

5. Tahun 2004

   Perekonomiam Indonesia pada tahun 2004 bila dilihat berdasarkan harga yang berlaku. PDB tahun 2004 naik sebesar Rp 509,13 triliun dari Rp 1786,7 triliun pada tahun 2003 menjadi sebesar Rp 2295,83 trilun pada tahu 2004. PDB menurut sektor atas dasar harga berlaku juga menunjukkan peranan sektor dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor uatama yaitu sektor pertanian, industri pengelohan, dan perdagangan mempunyai peranan sebesar 58,5 persen tahun 2004. Sektor industri pengelohan memberi kontribusi sebesar 28,1 persen, sektor perdagangan-hotel-restoran 16,1 persen, dan sektor pertanian 14,3 persen. Penurunan yang cukup besra terjadi pada sektor pertanian dari 16,6 persen pada tahun 2003 menjadi 14,3 persen pada tahun 2004. Sektor perdagangan-hotel-retoran mengalami penurunan dari 16,3 persen pada tahun 2003 menjadi 16,1 persen pada tahun 2004 pada sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan

dari 24,1 persen pada tahun 2004 menjadi 28,1 persen pada tahun 2004, serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan pertumbuahn dari 6,9 persen padan tahun 2003 menjadi 8,5 persen pad athun 2004.

6. Tahun 2005

   Perkonomian Indonesia pada tahun 2005 bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2005 naik sebesar Rp. 478,45 triliun dari Rp. 2.295,83 padatahun 2004 menjadi 2774,28 triliun pada tahun 2005. Selama tahun 2005, hampir semua sektor ekonomi yang membentuk PDB mengalami penurunan peranan. Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor indusri pengolahan, sektor perdaganagan-hotel-restoran mengalami penurunan peranan pada tahun 2005. Sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1 persen pada taahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2005. Sektor pertanian mengalami penurun dari 14,3 persen pada tahun 2004 menjadi 13,1 persem pada tahun 2005. Sektor perdagangan-hotel-restoran menurun dari 16,1 persen pada tahun 2004 menjadi 15,6 persen pada tahun 2005. Sementara sektor pertambangan naik dari 8,9 persen pada tahun 2004 menjadi 11,1 persen pada tahun 2005. Selanjutnya jika dilihat secar total peranan PDB tanpa migas menurun dari 91,15 persen pada tahun 2004 menjadi 88,93 persen pada tahun 2005.

7. Tahun 2006

   Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, PDB tahun 2006 naik sebesar Rp. 1564,94 triliun dari Rp. 2774,28 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp. 4339,22 triliun pada tahun 2006. Selama tahun 2006 semua sektor

ekomoni yang membentuk PDB mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar Rp. 432,17 triliun. Sektor industry pengolahan member kontribusi sebesar 27,5 persen, sektor perdagangan-hotal-restoran 15 persen. Dibandingkan dengan 2005, pada tahun 2006 terjadi perubahan peranan pada beberapa sektor ekonomi yaitu penurunan pada sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air, sektor perdagangan-hotel-restoran, serta keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada sektor perdagangan-hotel-restoran dari 16,1 persen pada tahun 2005 menjadi 15,6 persen pada tahun 2006. Peranan sektor pertambangan dan penggalian menurun dari 11,1 tahun 2005 menjadi 11 persen pada tahun 2006. sektor pertanian menurun dari 13,1 persen pada tahun 2005 menjadi 13 persen pada tahun 2006, sektor keuangan,real estate dan jasa dari 8,3 persen menjadi 8,1 persen, sektor listrik, gas, dan air bersih menurun dari 1,0 persen menjadi 0,9 persen. Sementara sektor pemgamkutan dan komunikasi naik dari 7 persen menjadi 7,5 persen, sektor pengankutan dan komunikasi naik dari 6,5 persen menjadi 6,9 persen, sektor industry pengolahan naik dari 27,4 persen menjadi 27,5 persen dan sektor jasa-jasa naik dari 10 persen menjadi 10,1 persen. Selanjutnya jika dilihat secara total, peranan PDB tanpa migas naik dari 88,6 persen pada tahun 2005 menjadi 89,2 persen pada tahun 2006.

8. Tahun 2007

   Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan, bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2007 naik sebesar Rp 211,67

triliun, yaitu dari Rp 4339,22 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp. 4550,89 triliun pada tahun 2007. Dibandingkan dengan 2006, pada tahun 2007 terjadi perunahan peranan pada beberapa sektor ekonomi yaitu penurunan pada sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan. Penurunan yang cukup besar terjadi pada sektor industry pengelolahan dari 27,5 persen pada tahun 2006 menjadi 27 persen pada tahun 2007. Peranan sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan menurun dari 8,1 persen menjadi 7,7 persen, sektor pengakutan dan komunikasi dari 6,9 persen menjadi 6,7 persen dan sektor perdagangan, hotel, restoran menurun dari 15 persen menjadi 14,9 persen. Sementara sektor pertanian naik peranannya dari 13 persen pada tahun 2006 menjadi 13,7 persen pada tahun 2007, sektor pertambangan, penggalian naik tipis dari 11 persen menjadi 11,2 persen, dan sektor kontruksi naik dari 7,5 persen menjadi 7,7 persen. Untuk sektor listrik,gas dan air bersih dan jasa-jasa, kontribusinya sama pada tahun 2006 dan 2007 masing-masing 0,9 persen dan 10,1 persen. Selanjutnya jika dilihat secara total, peranan PDB tanpa migas naik dari 88,9 persen pada tahun 2006 menjadi 89,5 persen pada tahun 2007.

9. Tahun 2008

   Pada tahun 2008 PDB naik sebesar Rp. 400,47 triliun, yaitu dari Rp. 4550,89 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp. 4951,36 triliun pada tahun 2008.dibangkan dengan tahun 2007, pada tahun 2008 terjadi penuruna pada semua sektor kecuali sektor pertanian, sektor industry pengolahan, dan sektor

kontruksi. Penurunan yang terjadi diakibatkan oleh dampak krisis ekonomi global. Peranan sektor pertambangan dan penggalian turun dari 11,2 persen menjadi 10,9 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran menurun dari 14,9 persen menjadi 14 persen, sektor jasa-jasa dari 10,1 persen menjadi 9,7 persen, sektor keuangan, real estate, jasa perusahan menurun dari 7,7 persen menjadi 7,4 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi dari 6,7 persen menjadi 6,3 persen, dan sektor listrik, gas dan air bersih dari 0.9 persen menjadi 0.8 persen. Sementara sektor pertanian naik dari 13,7 persen menjadi 14,5 persen, sektor industri pengolahan dari 27 persen menjadi 27,9 persen. Dan sektor kontruksi naik 7,7 persen menjadi 8,5 persen. Selanjutnya jika dilihat dari peranan PDB tanpa migas turun dari 89,5 persen pada tahun 2007 menjadi 89,3 persen pada tahun 2008.

10. Tahun 2009

Pada tahun 2009 PDB naik sebesar Rp. 662,08 triliun, yaitu dari Rp. 4951,36 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 5613,44 triliun pada tahun 2009.dibandingkan dengan tahun 2008, pada tahun 2009 terjadi penuruna pada semua sektor kecuali sektor pertanian, sektor jasa-jasa, dan sektor kontruksi. Penurunan masih terjadi diakibatkan oleh dampak krisis ekonomi global. Peranan sektor industri pengolahan mulai menunjukan perlambatan dari 27,9 persen menjadi 26,4 persen, sektor pertambangan dan penggalian turun dari 10,9 persen menjadi 10,5 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran menurun dari 14 persen menjadi 13,4 persen, sektor keuangan, real estate, jasa perusahan menurun dari 7,4 persen menjadi 7,2 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi dan

sektor listrik, gas dan air bersih kontribusinya sama masing-masing 6,3 persen dan 0,8 persen. Sementara sektor pertanian naik dari 14,5 persen menjadi 15,3 persen, sektor kontruksi naik dari 8,5 persen menjadi 9,9 persen, dan sektor jasa-jasa naik 9,7 persen menjadi 10,2 persen

1. **PDB Menurut Penggunaan**

   Tahun 2001

   Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

   Selama triwulan I tahun 2001 sampai dengan IV tahun 2001 pengeluaran konsumsi rumahtangga baik atas dasar harga berlaku cenderung naik. Khusus pada triwulan IV tahun 2001 terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga yang cukup berarti, walaupun terjadi kenaikan tingkat harga (inflasi) pada triwulan tersebut yang merupakan dampak dari penyelenggaraan hari- hari raya (besar), seperti natal, tahun baru serta lebaran yang terjadi pada triwulan tersebut.

Tabel 4.2
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2001
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	234.9	343.8	252.7	265.8	999.3

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2002

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Selama triwulan I tahun 2001 sampai dengan IV tahun 2001 pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku cenderung naik dimana porsi terbesar pengeluarannya berasal dari belanja barang.

Tabel 4.3
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2001
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	23.8	26.4	28.5	32.1	110.8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2002

Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)

Kegiatan investasi selama tahun 2001 menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDB Indonesia. Selama triwulan I tahun 2001 sampai dengan triwulan III tahun 2001 nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) baik atas dasar harga berlaku cenderung menurun, sebaliknya pada triwulan IV tahun 2001 menunjukkan adanya kenaikan.

Tabel 4.4
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2001
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	78.9	79.9	74.8	77.3	310.9

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2002

Ekspor dan Impor Barang & Jasa

Surplus perdagangan internasional terjadi pada tahun 2001, yaitu sebesar Rp. 126,8 triliun atas dasar harga berlaku atau. Tetapi ternyata pola laju pertumbuhan ekspor berbeda dengan laju pertumbuhan impor. Selama triwulan I tahun 2001 sampai dengan triwulan II tahun 2001 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan adanya sedikit kenaikan tetapi pada triwulan III/2001 sampai dengan IV tahun 2001 terjadi penurunan. Sebaliknya impor barang dan jasa terus mengalami penurunan dari triwulan I tahun 2001 sampai dengan triwulan IV tahun 2001.

Tabel 4.5
Ekspor Dan Impor Barang Dan Jasa
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2001
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku					
Ekspor Barang & Jasa	154.2	174.1	147.8	136.3	612.5
Impor Barang & Jasa	140.1	145.6	105.2	94.8	485.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2002

Tahun 2002

Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Selama triwulan I tahun 2002 sampai dengan IV tahun 2002 pengeluaran konsumsi rumahtangga baik atas dasar harga berlaku cenderung naik. Khusus pada triwulan IV tahun 2002 terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga yang cukup berarti, walaupun terjadi kenaikan tingkat harga (inflasi) pada triwulan tersebut yang merupakan dampak dari penyelenggaraan

hari-hari raya (besar), seperti lebaran, natal serta persiapan tahun baru yang terjadi pada triwulan tersebut.

Tabel 4.6
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2002
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	270.4	276.7	287.3	303.3	1137.8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2003

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Selama triwulan I tahun 2002 sampai dengan IV tahun 2002 pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku cenderung naik dimana porsi terbesar pengeluarannya berasal dari belanja barang.

Tabel 4.7
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2002
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	29.0	30.4	34.0	38.8	132.2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2003

Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)

Walaupun kegiatan investasi pada tahun tahun 2002 secara total (tahunan) mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara triwulanan pergerakannya cenderung meningkat. Selama triwulan I tahun 2002 sampai dengan triwulan IV tahun 2002 nilai pembentukan modal tetap

bruto (PMTB) baik atas dasar harga berlaku meningkat, terutama yang terjadi pada triwulan IV tahun 2002.

Tabel 4.8
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2002
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	77.9	79.3	81.7	86.4	325.3

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2003

Ekspor dan Impor Barang & Jasa

Surplus perdagangan internasional terjadi pada tahun 2002, yaitu sebesar Rp. 110,3 triliun atas dasar harga berlaku. Tetapi ternyata pola laju pertumbuhan ekspor sedikit berbeda dengan laju pertumbuhan impor. Selama triwulan I tahun 2002 sampai dengan triwulan III tahun 2002 nilai ekspor barang dan jasa atas dasar harga konstan menunjukkan adanya sedikit kenaikan tetapi pada triwulan IV tahun 2002 terjadi penurunan. Sebaliknya impor barang dan jasa terus mengalami peningkatan dari triwulan I tahun 2002

Tabel 4.9
Ekspor Dan Impor Barang Dan Jasa
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2002
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku					
Ekspor Barang & Jasa	143.4	141.7	146.3	138.5	569.9
Impor Barang & Jasa	105.8	108.7	119.6	125.5	459.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2003

Tahun 2003

Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga

Selama triwulan I tahun 2003 sampai dengan IV tahun 2003 pengeluaran konsumsi rumahtangga baik atas dasar harga berlaku cenderung naik. Khusus pada triwulan IV tahun 2003 terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumahtangga yang cukup berarti, walaupun terjadi kenaikan tingkat harga (inflasi) pada triwulan tersebut yang merupakan dampak dari penyelenggaraan hari-hari raya (besar), seperti Lebaran ,Natal, dan persiapan tahun baru yang terjadi pada triwulan tersebut.

Tabel 4.10
Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2003
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	300.5	303.5	309.3	325.6	1238.9

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Selama triwulan I tahun 2003 sampai dengan IV tahun 2003 pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku cenderung naik dimana porsi terbesar pengeluarannya berasal dari belanja barang.

Tabel 4.11
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2003
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	33.0	37.7	42.8	50.2	163.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004

Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)

Walaupun kegiatan investasi pada tahun tahun 2003 secara total (tahunan) mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun secara triwulanan pergerakannya cenderung meningkat. Selama triwulan I tahun 2003 sampai dengan triwulan IV tahun 2003 nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atas dasar harga berlaku selalu meningkat. Sama seperti pola pengeluaran untuk konsumsi, nilai PMTB pada triwulan IV tahun 2003 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan kenaikan pada triwulan-triwulan sebelumnya.

Tabel 4.12
Pembentuk Modal tetap Bruto
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2003
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku	85.5	86.8	87.1	93.0	352.4

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004

Ekspor dan Impor Barang & Jasa

Surplus perdagangan internasional terjadi pada tahun 2003, yaitu sebesar Rp. 99,1 triliun atas dasar harga berlaku Menurut triwulanan, ekspor barang hampir merata sepanjang selama empat triwulan, sementara impor barang dan jasa sedikit terjadi fluktuasi yaitu tertinggi terjadi pada triwulan I, setelah itu terjadi penurunan yang cukup tajam pada triwulan II kemudian menaik lagi pada triwulan III dan triwulan IV. Secara ril atau penilaian atas dasar harga konstan kegiatan ekspor selalu mengalami peningkatan. Sementara kegiatan impor barang dan jasa pola pertumbuhannya terjadi penurunan pada triwulan II namun kembali menaik pada triwulan III dan IV.

Tabel 4.13
Ekspor Dan Impor Barang Dan Jasa
Triwulan Sampai Dengan IV Tahun 2003
(Triliun Rupiah)

Rincian	I	II	III	IV	Tahun 2001
Atas Dasar Harga Berlaku					
Ekspor Barang & Jasa	141.9	138.0	140.0	138.3	558.2
Impor Barang & Jasa	118.6	109.4	112.6	118.5	459.1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2004

Tahun 2004

PDB atas dasar harga berlaku tahun 2004 senilai Rp. 2.303,03 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yakni sebesar Rp. 1.532,39 triliun. Komponen penggunaan lainnya adalah untuk pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar Rp. 187,77 triliun, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik Rp. 483,44 triliun, perubahan inventori Rp. 40,90

triliun, serta transaksi ekspor Rp. 711,78 triliun dan impor Rp. 620,18 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2003), peningkatan PDB harga berlaku dari Rp. 2.045,85 triliun menjadi Rp. 2.303,03 triliun tersebut didukung oleh kenaikan pada seluruh komponen penggunaan, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Nilai Dan Laju Pertumbuhan PDB
Menurut Penggunaan
Tahun 2003 - 2004

Komponen Penggunaan	Atas Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	
	2003	**2004**
Konsumsi Rumah Tangga	1372.08	1532.39
Konsumsi Pemerintah	163.70	187.77
Pembentukan Modal Tetap Bruto	386.22	483.44
Perubahan Inventori	-26.17	40.90
Statistik Diskrepansi	-6.04	-33.07
Ekspor	627.06	711.78
Dikurangi Impor	471.00	620.18
Produk Domestik Bruto	**2045.85**	**2303.03**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2004 tercatat sebesar 5,13 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh semua komponen PDB penggunaan, yakni konsumsi rumahtangga tumbuh 4,94 persen, konsumsi pemerintah 1.95 persen, pembentukan modal tetap bruto 15,71 persen, serta ekspor-impor barang dan jasa, masing-masing meningkat sebesar 8,47 persen dan 24,95 persen. Pertumbuhan PDB tahunan tersebut merupakan pertumbuhan kumulatif dari PDB triwulanan yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.15
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Komponen Penggunaan Triwulan
Tahun 2004

Komponen Penggunaan	Triwulan III 2004 Terhadap Triwulan II 2004	Triwulan IV 2004 Terhadap Triwulan III 2004	Triwulan IV 2004 Terhadap Triwulan IV 2003
Konsumsi Rumah Tangga	0.98	1.29	3.75
Konsumsi Pemerintah	-2.91	17.94	-1.33
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.54	4.78	18.29
Ekspor	11.05	-3.08	13.72
Dikurangi Impor	10.38	0.92	27.11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005

Pertumbuhan masing-masing komponen penggunaan pada triwulan III terhadap triwulan II tahun 2004 mengalami peningkatan kecuali untuk konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan sebesar minus 2,19 persen. Laju pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada transaksi ekspor dan impor masing-masing meningkat sebesar 11,05 persen dan 10,38 persen. Sebaliknya konsumsi rumah tangga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya semua komponen PDB pada triwulan IV terhadap triwulan III mengalami peningkatan kecuali ekspor turun sebesar minus 3,08 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada konsumsi pemerintah yakni sebesar 17,94 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya (2003) secara umum pada triwulan IV tahun 2004 terjadi peningkatan pertumbuhan kecuali untuk konsumsi pemerintah turun sebesar minus 1,33 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen impor mencapai sebesar 27,11 persen, diikuti oleh pembentukan modal tetap

bruto sebesar 18,29 persen. Di samping itu, konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni sebesar 3,75 persen. Dilihat dari pola distribusi PDB penggunaan, tampak bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar, walaupun porsinya cenderung mengalami penurunan dari 67,07 persen pada tahun 2003 menjadi 66,54 persen pada tahun 2004. Sebaliknya, masih dalam periode yang sama, porsi komponen penggunaan lainnya menunjukkan peningkatan, diantaranya konsumsi pemerintah dari 8,00 persen menjadi 8,15 persen, pembentukan modal tetap bruto dari 18,88 persen menjadi 20,99 persen dan perubahan inventori dari minus 1,28 persen menjadi 1,78 persen. Demikian pula dengan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa yang porsinya juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2003), yaitu ekspor dari 30,65 persen menjadi 30,91 persen, dan impor meningkat relatif cukup tinggi yakni dari 23,02 persen menjadi 26,93 persen.

Tahun 2005

PDB atas dasar harga berlaku tahun 2005 senilai Rp 2.729,7 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga yaitu sebesar Rp 1.785,6 triliun. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp 225,0 triliun, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar Rp 599,8 triliun, perubahan inventori sebesar Rp 7,2 triliun, transaksi ekspor sebesar Rp 915,6 triliun dan impor sebesar Rp 797,3 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2004), peningkatan PDB harga berlaku dari Rp 2.273,1 triliun menjadi Rp 2.729,7 triliun tersebut didukung oleh kenaikan pada seluruh komponen penggunaan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16
Nilai Dan Laju Pertumbuhan PDB
Menurut Penggunaan
Tahun 2004 - 2005

Komponen Penggunaan	Atas Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	
	2004	**2005**
Konsumsi Rumah Tangga	1532.9	1785.6
Konsumsi Pemerintah	191.1	225.0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	492.8	599.8
Perubahan Inventori	34.5	7.2
Statistik Diskrepansi	-84.0	-6.2
Ekspor	729.3	915.6
Dikurangi Impor	623.5	797.3
Produk Domestik Bruto	**2273.1**	**2729.7**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,60 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh semua komponen PDB penggunaan, yakni konsumsi rumahtangga yang tumbuh sebesar 3,95 persen, konsumsi pemerintah sebesar 8,06 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 9,93 persen, serta ekspor maupun impor barang dan jasa, yang masingmasing meningkat sebesar 8,60 persen dan 12,35 persen. Pertumbuhan PDB tahunan tersebut merupakan pertumbuhan kumulatif dari PDB triwulanan yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.17
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Komponen
Penggunaan Triwulan
Tahun 2005

Komponen Penggunaan	Triwulan III 2005 Terhadap Triwulan II 2005	Triwulan IV 2005 Terhadap Triwulan III 2005	Triwulan IV 2005 Terhadap Triwulan IV 2004
Konsumsi Rumah Tangga	1.66	1.10	4.18
Konsumsi Pemerintah	20.22	33.22	29.98
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.21	-475	1.78
Ekspor	5.08	2.49	7.41
Dikurangi Impor	3.55	-3.40	3.74

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006

Pertumbuhan masing-masing komponen penggunaan pada triwulan III terhadap triwulan II tahun 2005 mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada konsumsi pemerintah dan transaksi ekspor yang masing-masing meningkat sebesar 20,22 persen dan 5,08 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya semua komponen PDB pada triwulan IV terhadap triwulan III yang mengalami peningkatan kecuali komponen pembentukan modal tetap bruto dan impor yang masing-masing turun sebesar minus 4,75 persen dan minus 3,40 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 33,22 persen

Dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya (2004) secara umum pada triwulan IV tahun 2005 semua komponen penggunaan menunjukkan peningkatan. Tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada komponen konsumsi pemerintah yang mencapai 29,98 persen,

diikuti oleh komponen ekspor sebesar 7,41 persen. Di samping itu konsumsi rumahtangga juga mengalami peningkatan yang cukup berarti sebesar 4,18 persen.

Dilihat pola distribusi PDB penggunaan, tampak bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia; meskipun porsinya cenderung mengalami penurunan dari 67,43 persen pada tahun 2004 menjadi sebesar 65,41 persen pada tahun 2005. Sebaliknya, masih dalam periode yang sama porsi komponen penggunaan lainnya menunjukkan peningkatan, di antaranya pembentukan modal tetap bruto dari 21,68 persen menjadi 21,97 persen, dan ekspor barang dan jasa dari 32,08 persen menjadi sebesar 33,54 persen. Demikian pula dengan kegiatan impor barang dan jasa yang porsinya juga mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya (2004) dari 27,43 persen menjadi 29,21 persen.

Tahun 2006

PDB atas dasar harga berlaku tahun 2006 senilai Rp3.338,2 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp2.092,76 triliun. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp288,1 triliun, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar Rp800,1 triliun, perubahan inventori sebesar Rp19,6 triliun, transaksi ekspor sebesar Rp1.030,8 triliun dan impor sebesar Rp870,1 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2005, PDB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp2.785,0 triliun menjadi Rp3.338,1 triliun. Hal tersebut

didukung oleh kenaikan pada seluruh komponen penggunaan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18
Nilai Dan Laju Pertumbuhan PDB
Menurut Penggunaan
Tahun 2005 - 2006

Komponen Penggunaan	Atas Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	
	2005	**2006**
Konsumsi Rumah Tangga	1785.6	2092.7
Konsumsi Pemerintah	225.0	288.1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	657.6	800.1
Perubahan Inventori	27.7	19.6
Statistik Diskrepansi	-30.5	-23.0
Ekspor	936.0	1030.8
Dikurangi Impor	816.4	870.1
Produk Domestik Bruto	**2785.0**	**3338.2**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2006 tercatat sebesar 5,5 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh semua komponen PDB penggunaan, yakni konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,2 persen, konsumsi pemerintah sebesar 9,6 persen, pembentukan modal tetap brutosebesar 2,9 persen, serta ekspor maupun impor barang dan jasa, masing-masing meningkatsebesar 9,2 persen dan 7,6 persen. Pertumbuhan PDB tahunan tersebut merupakan pertumbuhan kumulatif dari PDB triwulanan yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan.Pertumbuhan ekonomi tahun 2006 sebagian besar bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa. Dari 5,5 persen pertumbuhan tahun 2006 (*c-to-c*), 4,1 persen bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa. Komponen terbesar PDB yaitu konsumsi rumah tangga hanya memberikan

sumbangan sebesar 1,9 persen. Sementara pengeluaran konsumsi pemerintah serta pembentukan modal tetap bruto memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan masing-masing sebesar 0,7 persen.

Tabel 4.19
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Komponen Penggunaan Triwulan
Tahun 2006

Komponen Penggunaan	Triwulan III 2006 Terhadap Triwulan II 2006	Triwulan IV 2006 Terhadap Triwulan III 2006	Triwulan IV 2006 Terhadap Triwulan IV 2006
Konsumsi Rumah Tangga	1.7	1.9	3.8
Konsumsi Pemerintah	-5.0	28.6	2.2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.4	1.4	8.2
Ekspor	4.1	1.7	6.1
Dikurangi Impor	5.5	-4.3	9.7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007

2006 mengalami peningkatan kecuali konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada komponen impor dan ekspor yang masing-masing meningkat sebesar 5,5 persen dan 4,1 persen. Sedangkan konsumsi rumah tangga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Selanjutnya semua komponen PDB pada triwulan IV terhadap triwulan III mengalami peningkatan kecuali komponen impor yang turun sebesar minus 4,3 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada konsumsi pemerintah yang meningkat sebesar 28,6 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya (2005) secara umum pada triwulan IV tahun 2006 semua komponen penggunaan menunjukkan peningkatan. Tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada komponen

impor yang mencapai 9,7 persen, diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 8,2 persen. Di samping itu ekspor dan konsumsi rumah tangga juga mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 6,1 persen dan 3,8 persen. Dilihat dari pola distribusi PDB penggunaan, tampak bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia; meskipun porsinya cenderung mengalami penurunan dari 64,1 persen pada tahun 2005 menjadi sebesar 62,7 persen pada tahun 2006. Komponen lain yang juga mengalami penurunan adalah ekspor dari 33,6 persen menjadi 30,9 persen dan impor dari 29,3 persen menjadi 26,1 persen pada tahun 2006. Sebaliknya, masih dalam periode yang sama porsi komponen penggunaan lainnya menunjukkan peningkatan, di antaranya konsumsi pemerintah dari 8,1 persen manjadi 8,6 persen dan pembentukan modal tetap bruto dari 23,6 persen menjadi sebesar 24,0 persen.

Tahun 2007

PDB atas dasar harga berlaku tahun 2007 senilai Rp 3.957,4 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp 2.511,3 triliun. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp 329,8 triliun, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar Rp 983,8 triliun, perubahan inventori sebesar Rp 0,2 triliun, transaksi ekspor sebesar Rp 1.162,0 triliun dan impor sebesar Rp 1.002,5 triliun.

Tabel 4.20
Nilai Dan Laju Pertumbuhan PDB
Menurut Penggunaan
Tahun 2006 - 2007

Komponen Penggunaan	Atas Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	
	2006	**2007**
Konsumsi Rumah Tangga	2092.7	2511.3
Konsumsi Pemerintah	288.1	329.8
Pembentukan Modal Tetap Bruto	805.5	983.8
Perubahan Inventori	42.4	0.2
Statistik Diskrepansi	-69.9	-27.2
Ekspor	1036.3	1162.0
Dikurangi Impor	855.6	1002.5
Produk Domestik Bruto	**3339.5**	**3957.4**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 tercatat sebesar 6,3 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh semua komponen PDB penggunaan, yakni konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,0 persen, konsumsi pemerintah sebesar 3,9 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 9,2 persen, serta ekspor maupun impor barang dan jasa, masing-masing meningkat sebesar 8,0 persen dan 8,9 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebagian besar bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa. Dari 6,3 persen pertumbuhan tahun 2007, 3,8 persen bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa. Komponen terbesar PDB yaitu konsumsi rumah tangga hanya memberikan sumbangan sebesar 2,9 persen. Sementara pembentukan modal tetap bruto serta pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan masing-masing sebesar 2,0 persen dan 0,3 persen

Tabel 4.21
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Komponen Penggunaan Triwulan Tahun 2007

Komponen Penggunaan	Triwulan III 2007 Terhadap Triwulan II 2007	Triwulan IV 2007 Terhadap Triwulan III 2007	Triwulan IV 2007 Terhadap Triwulan IV 2007
Konsumsi Rumah Tangga	2.1	2.3	5.6
Konsumsi Pemerintah	-2.6	23.2	2.0
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.4	2.3	12.2
Ekspor	1.4	2.6	7.3
Dikurangi Impor	5.5	1.3	13.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2008

Pertumbuhan PDB pada triwulan IV terhadap triwulan III tahun 2007 mengalami kontraksi 2,1 persen. Menurut komponennya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 2,3 persen, konsumsi pemerintah 23,2 persen, PMTB 2,3 persen, ekspor 2,6 persen dan impor sebesar 1,3 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan yang sama tahun sebelumnya (*y-on-y*) secara umum pada triwulan IV tahun 2007 semua komponen penggunaan menunjukkan peningkatan. Tingkat pertumbuhan terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga 5,6 persen, konsumsi pemerintah 2,0 persen, diikuti oleh komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 12,1 persen. Di samping itu ekspor juga mengalami peningkatan sebesar 7,3 persen. Dilihat dari pola distribusi PDB penggunaan, tampak bahwa konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia; yaitu meningkat dari 62,7 persen pada tahun 2006 menjadi sebesar 63,5 persen pada tahun 2007. Komponen lain yang juga

mengalami peningkatan adalah pembentukan modal tetap bruto dari 24,1 persen menjadi 24,9 persen pada tahun 2007. Sebaliknya, masih dalam periode yang sama porsi komponen penggunaan lainnya menunjukkan penurunan, diantaranya konsumsi pemerintah dari 8,6 persen menjadi 8,3 persen dan ekspor dari 31,0 persen menjadi sebesar 29,4 persen.

Tahun 2008

PDB atas dasar harga berlaku tahun 2008 senilai Rp4.954,0 triliun, sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebesar Rp3.019,5 triliun. Komponen penggunaan lainnya meliputi pengeluaran untuk konsumsi pemerintah sebesar Rp416,9 triliun, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar Rp1.369,6 triliun, perubahan inventori sebesar Rp7,7 triliun, transaksi ekspor sebesar Rp1.474,5 triliun dan impor sebesar Rp1.418,1 triliun. Dibandingkan dengan tahun 2007, PDB atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp3.949,3 triliun menjadi Rp4.954,0 triliun. Hal tersebut didukung oleh kenaikan pada seluruh komponen penggunaan, seperti terlihat pada tabel beriku

Tabel 4.21
Nilai Dan Laju Pertumbuhan PDB
Menurut Penggunaan
Tahun 2007-2008

Komponen Penggunaan	Atas Harga Berlaku (Triliun Rupiah)	
	2007	**2008**
Konsumsi Rumah Tangga	2510.5	3019.5
Konsumsi Pemerintah	329.8	416.9
Pembentukan Modal Tetap Bruto	986.2	1369.6
Perubahan Inventori	-1.1	7.7
Statistik Diskrepansi	-35.8	83.9
Ekspor	1163.0	1474.5
Dikurangi Impor	1003.3	1418.1
Produk Domestik Bruto	**3949.3**	**4954.0**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 tercatat sebesar 6,1 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh semua komponen PDB penggunaan, yakni konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,3 persen, konsumsi pemerintah sebesar 10,4 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 11,7 persen, serta ekspor barang dan jasa sebesar 9,5 persen. Sementara impor sebagai komponen pengurang juga meningkat sebesar 10,0 persen. Pertumbuhan PDB tahunan tersebut merupakan pertumbuhan kumulatif dari PDB triwulanan yang terbentuk pada tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebagian besar bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa. Dari 6,1 persen pertumbuhan tahun 2008, 4,6 persen bersumber dari komponen ekspor barang dan jasa. Komponen terbesar PDB yaitu konsumsi rumah tangga hanya memberikan sumbangan sebesar 3,1 persen. Sementara pembentukan modal tetap bruto serta pengeluaran konsumsi pemerintah

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan masing-masing sebesar 2,6 persen dan 0,8 persen.

Tabel 4.22
Laju Pertumbuhan PDB Menurut Komponen Penggunaan Triwulan
Tahun 2008

Komponen Penggunaan	Triwulan III 2008 Terhadap Triwulan II 2008	Triwulan IV 2008 Terhadap Triwulan III 2008	Triwulan IV 2008 Terhadap Triwulan IV 2008
Konsumsi Rumah Tangga	1.9	1.7	4.8
Konsumsi Pemerintah	5.6	25.6	16.3
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.2	0.8	9.1
Ekspor	-0.1	-5.5	1.8
Dikurangi Impor	0.8	-11.7	-3.5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2009

Pertumbuhan masing-masing komponen penggunaan, *q-to-q* pada triwulan IV-2008 dibandingkan dengan triwulan III-2008 mengalami perlambatan kecuali konsumsi pemerintah yang mengalami percepatan, sedangkan komponen ekspor dan impor mengalami kontraksi. Laju pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV-2008 terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu sebesar 25,6 persen, konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto masing-masing meningkat sebesar 1,7 persen dan 0,8 persen. Sedangkan komponen ekspor dan impor mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 5,5 persen dan minus 11,7 persen. PDB menurut penggunaan pada triwulan IV-2008 terhadap triwulan IV-2007 mengalami peningkatan. Tingkat pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada komponen konsumsi pemerintah yang mencapai 16,3 persen, diikuti oleh

komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 9,1 persen. Disamping itu konsumsi rumah tangga dan ekspor juga mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 4,8 persen dan 1,8 persen. Sementara impor mengalami kontraksi sebesar minus 3,5 persen. Dilihat dari pola distribusi PDB penggunaan, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam penggunaan PDB Indonesia sekalipun mengalami penurunan dari 63,6 persen pada tahun 2007 menjadi sebesar 61,0 persen pada tahun 2008. Komponen lainnya mengalami peningkatan yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah dari 8,3 persen menjadi 8,4 persen pada tahun 2008. Pembentukan modal tetap bruto meningkat dari 25,0 persen menjadi 27,7 persen. Ekspor meningkat tipis dari 29,4 persen menjadi 29,8 persen pada periode yang sama, sementara impor mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan ekspor yaitu dari 25,4 persen menjadi 28,6 persen.

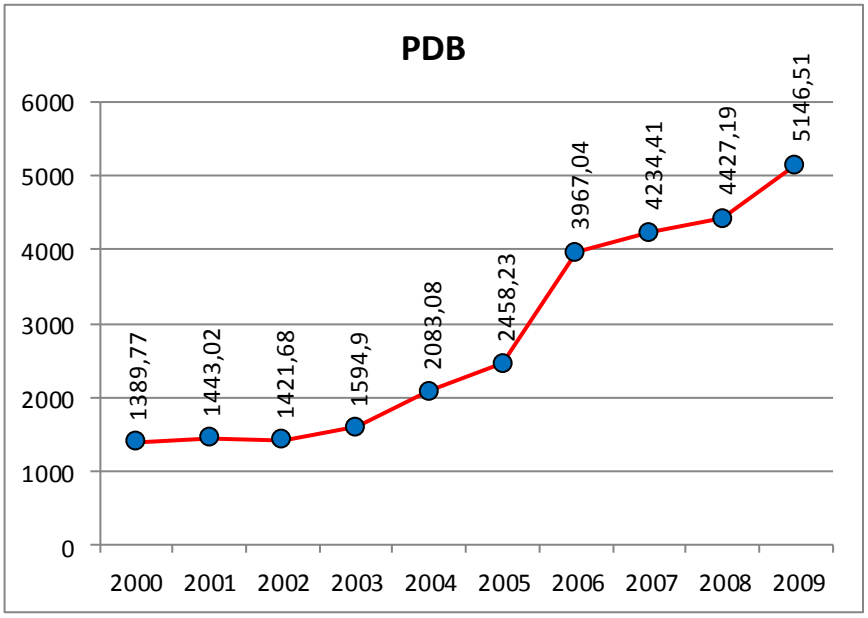
Berikut disajikan tabel dan grafik perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 2000-2009.

Table 4.23

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 2000-2009

Tahun	PDB (Triliun Rp)	Peningkatan (%)
2000	1389,77	-
2001	1443,02	3.83
2002	1421,68	-1.48
2003	1594,90	12.18
2004	2083,08	30.68
2005	2458,23	18.01
2006	3967,04	61.37
2007	4234,41	6.73
2008	4427,19	4.55
2009	5146,51	16.25

Sumber : Badan Pusar Statistik, 2009



Gambar 4.1 Tren Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 2000-2009

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa rata- rata Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 2000-2009 mengalami fluktuasi. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2000 sebesar Rp. 1389,77 triliun meningkat pada tahun 2001 menjadi Rp. 1443,02 triliun. Kemudian menurun pada tahun 2002 menjadi Rp 1421,68 triliun. Pada tahun 2003 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan terus menerus sebesar Rp. 3.724,83 triliun (Rp. 532,12 triliun per tahun) hingga mencapai angka Rp. 5.146,51 trilun pada 2009. Pada Tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 4.55 %, penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Rata- rata peningkatan teringgi terjadi pada tahun 2006 sebesar Rp 1.508,81 triliun, dan rata- rata terendah terjadi pada tahun 2001 sebesar -21,34. Secara *Overall* Indonesia pada periode tahun 2000 – 2009 mengalami pertumbuhan Ekonomi positif dengan angka pertumbuhan pertahun sebesar Rp 417,41 triliun per tahun.

4.1.2. Perubahan Penerimaan Pajak Indonesia Periode 2000-2009

Pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah hanya dapat berlangsung jika dana cukup bersedia. Salah satu sumber dana pemerintah yang cukup besar hingga saat ini bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pemerintah dari sumber pajak menunjukan peningkatan setiap tahun.

Table 4.24

Rencana dan Pencapaian Penerimaan Pajak

Uraian		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
PPh Non Migas	Rencana	-	69.696,2	87.200,0	104.304,8	112.767,2	143.017,4	175.012,0	214.480,6	251.366,0	291.175,8
	Realisasi	38.421,5	71.474,4	84.404,4	96.053,1	96.567,9	140.398,0	165.645,2	194.430,5	250.478,8	267.569,7
PPh Migas	Rencana	-	23.071,0	16.113,9	18.143,5	23.085.8	37.235,5	38.685,9	37.267,5	53.649,8	49.033,4
	Realisasi	11.651,5	23.101,6	17.469,1	18.962,5	22.946,6	35.143,2	43.187,9	44.000,5	77.081,9	50.043,7
PPN & PPnBM	Rencana	-	55.840,8	67.800,0	75.862,7	87.506,3	102.670,5	132.876,1	152.057,1	195.464,0	203.084,0
	Realisasi	41.928,9	55.957,0	65.153,0	77.081,5	102.572,7	101.295,8	123.035,9	154.526,8	209.647,4	214.529,0
PBB & BPHTB	Rencana	-	6.289,4	7.530,7	10.723,6	13.393,9	17.036,7	22.540,0	25.991,3	30.697,2	30.843,5
	Realisasi	3.107,3	6.662,9	7.827,7	10.905,3	14.685,2	19.648,6	24.043,0	29.676,9	30.927,4	30.732,9
Pajak Lainnya	Rencana	-	1.669,5	1.455,2	1.752,7	1838,30	2.198,3	2.589,7	2.719,5	3.353,7	3.249,9
	Realisasi	1.469,5	1.383,9	1.469,3	1.654,3	1872,10	2.050,2	2.287,4	2.737,7	3.034,4	3.114,2
Jumlah Tanpa PPh Migas	Rencana	-	133.495,9	163.985,9	192.643,8	215.505,7	264.922,9	333.017,8	395.248,6	480.880,9	528.353,3
	Realisasi	85.927,2	135.478,2	158.854,4	185.694,2	215.697,9	263.392,6	315.011,5	381.371,9	494.088,0	515,945,9
Jumlah Termasuk PPh Migas	Rencana	-	156.566,9	180.099,8	210.787,3	238.591,5	302.158,4	371.703,7	432.516,1	534.530,7	577.386,7
	Realisasi	96.578,7	158.579,8	176.323,5	204.656,7	238.644,5	298.535.8	358.199,4	425.372,4	571.106,9	565.989,7
Pencapaian	Tanpa Migas	-	101,48%	96,87%	96,39%	100,09%	99,42%	94,59%	96,49%	102,75%	97,65%
	Termasuk Migas	-	101,29%	97,90%	97,09%	100,02%	98,37%	96,37%	98,35%	106,84%	98,03%

Sumber: Buku Saku Pajak Dalam Angka, 2010

Pembahasan dari Rencana dan Pencapaian Penerimaan Pajak periode 2000-2009 adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2000

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2000 mencapai Rp 96.578,7 miliar. Kontribusi terbesar diperoleh dari PPN & PPnBM yang mencapai Rp. 41.928,9 miliar.

2. Tahun 2001

   Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2001 mencapai 101,29 persen. Hampir semua penerimaan pajak tercapai 100%, hanya pajak lainnya realisasinya yang tidak tercapai. Pajak lainnya mencapai Rp 1.383,9 miliar dari rencana penerimaan tahun 2001 sebesar Rp. 1.669,5 miliar.

3. Tahun 2002

   Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2002 mencapai 97,90 persen. Realisasi yang tidak mencapai 100 %, yaitu PPh non migas dan PPN & PPnBM. PPh non Migas mencapai Rp 84.404,4 miliar dari rencana penerimaan tahun 2002 sebesar Rp. 87.200,0 miliar. PPN & PPnBM mencapai Rp. 65.153,0 miliar dari rencana penerimaan tahun 2002 Rp. 67.800,0 miliar.

4. Tahun 2003

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2003 mencapai 97,09 persen. Realisasi yang tidak mencapai 100%, yaitu PPh non Migas dan Pajak lainnya. PPh non Migas mencapai Rp. 96.053,1 miliar rencana penerimaan tahun 2003 sebesar Rp 104.304,8 miliar. Pajak lainnya mencapai Rp. 1.654,3 miliar dari rencana tahun 2003 sebesar Rp. 1.752,7 miliar.

5. Tahun 2004

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2004 mencapai 100,02 persen. Realisasi yang tidak mencapai 100%, yaitu PPh non Migas dan PPh Migas. PPh non Migas mencapai Rp. 96.567,9 miliar rencana penerimaan tahun 2004 sebesar Rp 112.767,2 miliar. PPh Migas mencapai Rp. 22.946,6 miliar dari rencana tahun 2004 sebesar Rp. 23.085,8 miliar.

6. Tahun 2005

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2005 mencapai 98,37 persen. Realisasi yang mencapai 100%, yaitu PBB & BPHTB. PBB & BPHTB mencapai Rp. 19.648,6 miliar rencana penerimaan tahun 2005 sebesar Rp. 17.036,7 miliar.

7. Tahun 2006

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2006 mencapai 96,37 persen. Realisasi yang tidak mencapai 100%, yaitu PPh non Migas dan PPN & PPnBM . PPh non Migas mencapai Rp. 165.645,2 miliar rencana penerimaan tahun 2006 sebesar Rp 175.012,0 miliar. PPN & PPnBM mencapai Rp. 123.035,9 miliar dari rencana tahun 2006 sebesar Rp. 132.876,1 miliar.

8. Tahun 2007

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2007 mencapai 98,35 persen. Realisasi yang tidak mencapai 100%, yaitu PPh non Migas. PPh non Migas mencapai Rp. 194.430,5 miliar rencana penerimaan tahun 2007 sebesar Rp 214.480,6 miliar.

9. Tahun 2008

   Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 mencapai 106,84 persen. Realisasi yang tidak mencapai 100%, yaitu PPh non Migas dan Pajak lainnya. PPh non Migas mencapai Rp. 250.478,8 miliar rencana penerimaan tahun 2008 sebesar Rp 250.478,8 miliar. Pajak lainnya mencapai Rp. 3.034,4 miliar dari rencana tahun 2008 sebesar Rp. 3.353,7 miliar.

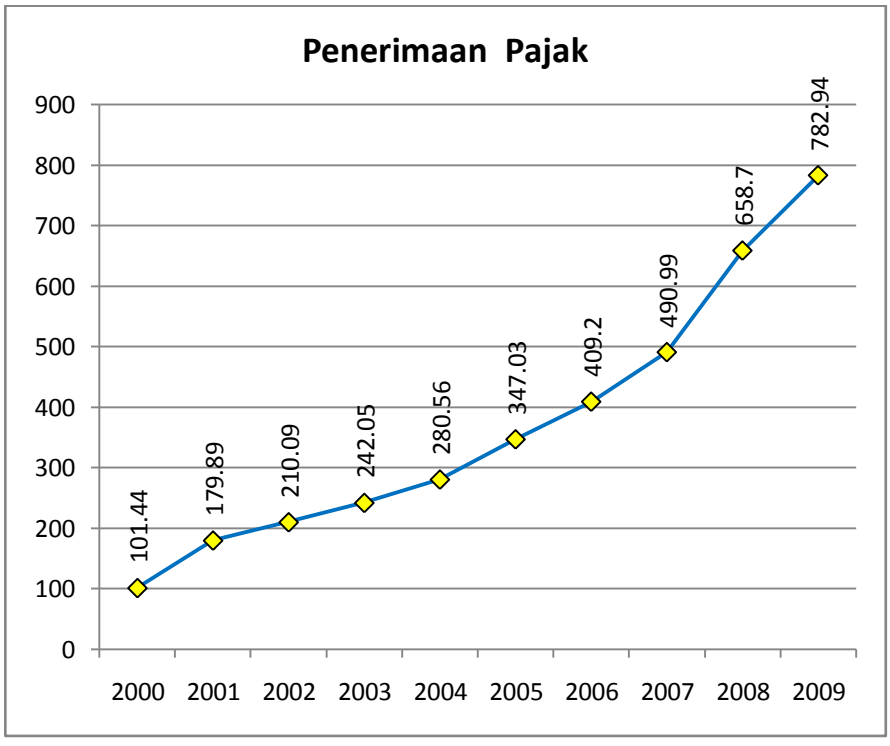
10. Tahun 2009

    Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 mencapai 97,65 persen. Realisasi yang tidak mencapai 100%, yaitu PPh non Migas, PBB & BPHTB, Pajak Lainnya. PPh non Migas mencapai Rp. 267.569,7 miliar rencana penerimaan tahun 2009 sebesar Rp 291.175,8 miliar. PBB & BPHTB mencapai Rp. 30.732,9 miliar rencana penerimaan tahun 2009 sebesar Rp 30.843,5 miliar. Pajak lainnya mencapai Rp. 3.114,2 miliar dari rencana tahun 2009 sebesar Rp. 3,249,9 miliar. Realisasi yang mencapai 100%, yaitu PPh Migas dan PPN & PPnBM. PPh Migas mencapai Rp. 50.043,7 miliar rencana penerimaan tahun 2009 sebesar Rp 49.033,4 miliar. PPN & PPnBM mencapai Rp. 214.529,0 miliar dari rencana tahun 2009 sebesar Rp. 203.084 miliar.

Berikut disajikan tabel dan grafik perkembangan penerimaan Pajak Indonesia .

Tabel 4.25 Perkembangan Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Penerimaan Pajak (Triliun Rp)	Peningkatan (%)
2000	101,44	-
2001	179,89	77.33
2002	210,09	16.78
2003	242,05	15.21
2004	280,56	15.90
2005	347,03	23.69
2006	409,20	17.91
2007	490,99	19.98
2008	658,70	34.15
2009	782,94	18.86



Gambar 4.2 Tren Perkembangan Penerimaan Pajak Indonesia

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, diketahui bahwa rata- rata penerimaan Pajak Indonesia periode 2000-2009 mengalami peningkatan. Pada

tahun 2000 rata- rata penerimaan Pajak Indonesia sebesar Rp 101,44 triliun, Pada tahun 2001 hingga tahun 2009 terus meningkat hingga menjadi Rp 782,94 triliun (rata-rata 75,72% per tahun) , angka peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar Rp. 167,71 triliun dan terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar Rp 30,2 triliun. Secara *Overall* pertumbuhan pajak dalam periode tahun 2000 - 2009 mengalami peningkatan positif sebesar Rp 75,72 triliun per tahun.

4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Indonesia periode 2000-2009

Untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Indonesia periode 2000-2009, maka dilakukan Regresi linear sedrhana dibawah ini :

4.3.1 Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah regresi bersifat linier atau tidak. Uji linieritas penelitian ini menggunakan ANOVA variabel X dan , dapat dari nilai signifikan. Apabila nilai signifikan < 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungan bersifat linier.

Hasil pengujian Uji Linieritas variabel PBB terhadap Penerimaan Pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.26
Uji Linieritas

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	386959.927	1	386959.927	75.314	.000[a]
	Residual	41103.673	8	5137.959		
	Total	428063.600	9			

a. Predictors: (Constant), pdb

b. Dependent Variable: pajak

Terlihat bahwa nilai sig sebesar 0,000. Nilai signifikansi < 0,05 yang berarti hubungan bersifat linier. Hal ini menunjukan bahwa Peroduk domesti bruto terhadap penerimaan pajak adalah berpola linier

4.3.2 Persamaan Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana yang akan dibentuk adalah:

$\hat{Y} = a + bX$

$\hat{Y}$ = nilai taksiran untuk variabel penerimaan Pajak Indonesia

a = konstanta

b = koefisien regresi

X = Pertumbuhan Ekonomi

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Tabel 4.27
Koefisien Regresi Linier Sederhana

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-28,038	51,152		-,548	,599
	PDB (X)	,141	,016	,951	8,687	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan output di atas, diperoleh nilai a sebesar -28,038, nilai b_1 sebesar 0,141. Dengan demikian maka dapat dibentuk persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -28{,}038+0{,}141\ X$$

Nilai a dan b_1 dalam persamaan di atas dapat diinteretasikan sebagai berikut:

a = -28,038 artinya: jika Pertumbuhan Ekonomi bernilai 0 persen maka penerimaan Pajak akan bernilai -28,038 persen.

b_1 = 0,141 artinya: jika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia meningkat sebesar satu persen maka penerimaan Pajak Indonesia akan meningkat sebesar 0,141 persen.

4.3.3 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier di antara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut akan diuraikan analisis korelasi baik korelasi parsial maupun korelasi sederhana.

4.3.3.1 Analisis Korelasi Antara Pertumbuhan Ekonomi (X) dengan Penerimaan Pajak Indonesia (Y) periode 2000-2009

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi (X) dengan penerimaan Pajak Indonesia (Y) periode 2000-2009 sebagai berikut:

Tabel 4.28
Koefisien Korelasi Antara X dengan Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,951[a]	,904	,892	71,67811

a. Predictors: (Constant), PDB (X)

Berdasarkan output di atas, diketahui koefisien korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan penerimaan Pajak Indonesia sebesar 0,951. Koefisien korelasi bertanda positif menunjukkan korelasi yang terjadi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan penerimaan Pajak Indonesia adalah searah, dimana semakin besar Pertumbuhan Ekonomi akan diikuti oleh semakin besarnya penerimaan Pajak Indonesia. Nilai 0,951 menunjukkan korelasi yang terjadi antara Pertumbuhan Ekonomi dengan penerimaan Pajak Indonesia berada dalam kategori hubungan yang sangat kuat (interval 0,80 – 1,00).

4.3.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (Kd) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi (R) atau disebut juga sebagai *R-Square*. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Indonesia terhadap

penerimaan Pajak Indonesia. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinasi yang dapat dilihat pada tabel output berikut:

Tabel 4.29
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,951[a]	,904	,892	71,67811

a. Predictors: (Constant), PDB (X)

Dari tabel hasil output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,904 atau 90,4% Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia memberikan pengaruh terhadap variabel penerimaan Pajak Indonesia sebesar 90,4%. sedangkan sisanya sebesar 100% - 90,4% = 9,6% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

4Pengujian Hipotesis

4.3.5.1 Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t)

Untuk menguji apakah variabel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Indonesia, maka dilakukan pengujian hipotesis simultan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0,$

Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Pertumbuhan Ekonomi (X) terhadap penerimaan Pajak Indonesia (variabel Y).

H_a : paling sedikit ada satu $\beta \neq 0,$

Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan dari Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (X) terhadap penerimaan Pajak Indonesia (variabel Y).

Taraf signifikansi (α) : 0,1 ,

Kriteria uji : tolak H_0 jika nilai t-hitung > t-tabel, terima H_a jika nilai t-hitung < t-tabel

Nilai statistik uji t dapat diketahui dari tabel output berikut:

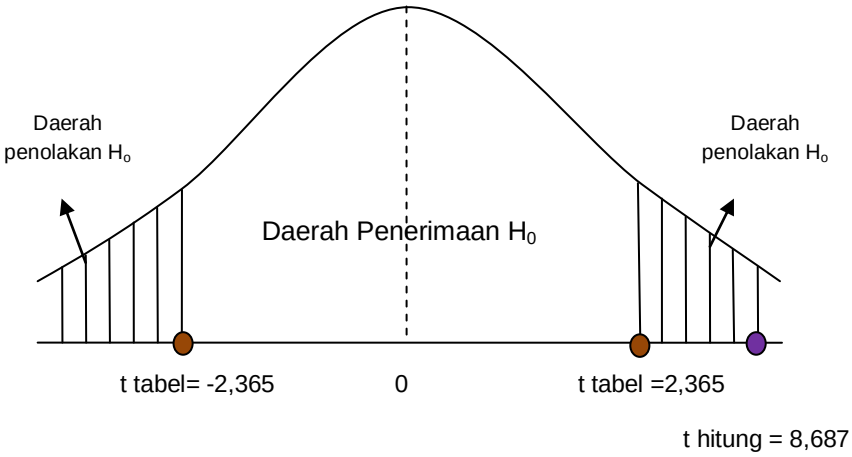
Tabel 4.30
Uji Statistik t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-28,038	51,152		-,548	,599
	PDB (X)	,141	,016	,951	8,687	,000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 8,687. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,10, df=n-k-1=10-2-1=7, untuk pengujian dua sisi diperoleh nilai t tabel sebesar ± 2,365. Diketahui bahwa t hitung untuk X sebesar 8,687 lebih besar darinilai t tabel (-2,365 dan 2,365) maka Ho ditolak, artinya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Indonesia. Jika digambarkan, nilai t hitung dan t tabel untuk pengujian parsial X tampak sebagai berikut:



Gambar 4.3 Kurva Uji Hipotesis Parsial X terhadap Y